

ANALISIS *WHISTLEBLOWING* SYSTEM DAN KOMPETENSI APARATUR TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD* (Studi Empiris pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis)

Endang Sri Wahyuni^{1,*}, Tiara Nova²
Politeknik Negeri Bengkalis, Bengkalis, Riau 28711

ARTICLE INFO

Keywords:

Whistleblowing system
Apparatus competency
Fraud prevention

Received: 10 December 2018

Accepted: 10 January 2018

Published: 11 January 2018

Open Access

ABSTRACT

The purpose of this study was to test the analysis whistleblowing system and the competence of apparatus to the fraud prevention. Object of this research is all SOPD of Bengkalis Regency. The data use in this research are primary data with analytical method is multiple regression analysis. The results of this research showed there is whistleblowing system and the competence of apparatus to the fraud prevention. Based on the research it was concluded that the determination coefficient is 70,6%. It means that 70,6% of the fraud prevention can be explained by the variable whistleblowing system and the competence of apparatus. While 29,4% is explained by other variables outside the model.

1. Pendahuluan

Organisasi sektor publik merupakan salah satu organisasi yang berorientasi pada kepentingan publik. Dengan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya, seharusnya pemerintah dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan berkualitas kepada masyarakat. Namun kenyataannya terkadang kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki pemerintah tidak dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan kenaikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Bahkan adanya praktek korupsi disektor publik yang tentu saja akan menciptakan lingkungan kerja yang tidak kondusif dan sangat merugikan pihak-pihak tertentu.

Korupsi telah dianggap sebagai kecurangan (*fraud*) yang sering terjadi di sektor publik. Karena Pada pemerintahan terdapat penerimaan (pendapatan), pengeluaran (belanja) yang dilakukan oleh pejabat terkait yang memiliki kekuasaan dan wewenang untuk membuat keputusan dan kebijakan publik. Semakin besar kekuasaan dan wewenang yang dimiliki oleh seseorang, maka potensi bagi dirinya untuk melakukan kecurangan akan semakin besar (Kurniawan, 2015:6-7). Kecurangan yang terjadi pada umumnya disebabkan oleh faktor pendorong yang bersifat internal berupa aspek psikologis seperti tekanan dan rasionalisasi atas tindakan yang dilakukan dan faktor pendorong eksternal berupa kesempatan untuk melakukan *fraud*.

Faktor-faktor tersebut dituangkan dalam konsep *fraudtriangle*.

Corruption Perception Index (CPI) mengukur tingkat persepsi korupsi di sektor publik, yaitu yang dilakukan oleh pejabat negara dan politisi. CPI direpresentasikan dalam bentuk skor dengan rentang 0-100.0 berarti negara dipersepsikan sangat korup, sementara skor 100 berarti dipersepsikan sangat bersih dari korupsi. Pada tahun 2013, Indonesia menduduki peringkat ke 114 dari 177 negara dengan skor 32. Di tahun 2014, skor Indonesia naik 2 poin menjadi 34 dengan peringkat ke 107 dari 175 negara yang diukur. Pada tahun 2015, Indonesia mendapatkan skor 36 dan menempati urutan 88 dari 168 negara.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat selama tahun 2013 terdapat 560 kasus yang ditangani aparat penegak hukum dengan jumlah tersangka 1.271 orang dan kerugian negara sebesar Rp 7,3 triliun. Di tahun 2014 terdapat 629 kasus dengan jumlah tersangka 1.328 orang dan kerugian negara Rp 5,29 triliun. Pada tahun 2015 mengalami penurunan kasus korupsi yaitu menjadi 550 kasus yang melibatkan 1.124 orang tersangka dengan kerugian negara Rp 3,1 triliun. Selama semester I 2016, terdapat 210 kasus dimana kerugian negara mencapai Rp 890, 5 miliar dengan jumlah tersangka sebanyak 500 orang.

* Corresponding author

E-mail addresses: endang.sri@polbeng.ac.id (E. S. Wahyuni)

2614-6983/ © 2018 P3M Politeknik Negeri Bengkalis. All rights reserved.

Dari data yang diperoleh dari Kejari Kabupaten Bengkalis, kasus *fraud* yang ditangani dari tahun 2015-2016 ada sekitar 29 pejabat telah ditetapkan sebagai tersangka. Kasus tersebut terdiri dari perkara tindak pidana korupsi penyertaan modal PT. Bumi Laksamana Jaya (BLJ) sebesar Rp 300 miliar, kegiatan pengadaan bibit tanaman kehutanan jenis tanaman serbaguna (MPTS) pada dinas Perkebunan dan kehutanan Bengkalis tahun 2013 dengan nilai Rp 6,1 miliar dan korupsi Bantuan Sosial (Bansos) yang berasal dari APBD Bengkalis tahun 2012 dengan kerugian Negara sebesar Rp 31,3 miliar serta penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2012 di Desa Semunai.

Dampak dari maraknya kasus korupsi yang terjadi sangat merugikan masyarakat dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, karena dapat membuat daerah mengalami kerugian dari segi keuangan yang dapat menghambat kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta menghambat pembangunan. Untuk meminimalisir kerugian yang terjadi perlu dilakukannya upaya pencegahan agar peluang terjadinya kecurangan akan semakin kecil.

Pencegahan kecurangan adalah tindakan yang dapat dilakukan untuk menghindari orang untuk berbohong, menjiplak, mencuri, memeras, memanipulasi, kolusi dan menipu orang lain dengan tujuan memperkayai diri sendiri atau orang/kelompok lain dengan cara melawan hukum (Suradi, 2006:99).

Upaya pencegahan *fraud* berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 diantaranya yaitu penguatan sistem pengendalian dan pengawasan internal pada K/L dengan mengoptimalkan *whistleblowing system*, keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga berkomitmen untuk mencegah terjadinya kecurangan. Bupati bersama Ketua DPRD menandatangani pakta integritas yang berisikan 9 butir upaya pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Ke-9 butir yang dimaksud diantaranya yaitu membangun sinergitas dan partisipasi seluruh komponen masyarakat terhadap penguatan tata kalola pemerintahan serta melaksanakan perbaikan pengelolaan SDM.

Kecurangan memang tidak dapat dihilangkan, tetapi dapat diminimalisir. Salah satu faktor dengan menerapkan *whistleblowing system*. *whistleblowing system* merupakan wadah bagi seorang *whistleblower* untuk mengadukan kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pihak internal organisasi. Sistem ini sangat memerlukan partisipasi seluruh unsur organisasi dalam proses pengungkapan maupun pelaporannya. Dengan penerapan yang efektif, transparan, dan bertanggungjawab akan mendorong dan meningkatkan partisipasi pegawai dan masyarakat untuk melaporkan dugaan kecurangan yang diketahuinya.

Penelitian yang dilakukan oleh Agusyani (2016) menemukan bahwa *whistleblowing system* memiliki pengaruh yang signifikan pada pencegahan kecurangan dalam organisasi. Namun berbeda dengan Titaheluw (2011) yang menyatakan sistem *whistleblowing* bukanlah satu-satunya cara yang dapat digunakan dalam mencegah terjadinya *fraud*, terdapat pula faktor-faktor lain.

Kompetensi aparatur merupakan suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut (Wibowo, 2016:271).

Penelitian yang dilakukan oleh Huslina (2015) dan Agusyani (2016) menunjukkan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hendriani (2013) yang menemukan bahwa tidak ada pengaruh kompetensi terhadap pencegahan *fraud*.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan untuk penelitian ini yaitu: 1) Apakah *Whistleblowing System* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis? 2) Apakah kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis?

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Pencegahan kecurangan (*Fraud*)

Menurut Karyono (2013:48) Pencegahan *fraud* merupakan aktivitas memerangi *fraud* dengan biaya yang murah. Upaya pencegahan *fraud* akan memberi penghematan yang besar karena biaya deteksi, investigasi dan proses peradilan dapat ditekan bahkan dapat diadukan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2008) menyatakan pencegahan *fraud* merupakan upaya terintegrasi yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab *fraud* (*fraudtriangle*) yaitu: 1) Memperkecil peluang terjadinya kesempatan untuk berbuat kecurangan. 2) Menurunkan tekanan kepada pegawai agar ia mampu memenuhi kebutuhannya. 3) Mengembangkan kode etik organisasi. 4) Mengeliminasi alasan untuk membuat pembenaran/rasionalisasi atas tindak kecurangan yang dilakukan.

2.2 *Whistleblowing System*

Menurut Nugroho (2015) sistem pelaporan pelanggaran atau yang biasa disebut *Whistleblowing system* adalah wadah bagi seorang *whistleblower* untuk mengadukan kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pihak internal organisasi. Penanganan *whistleblowing system* yang baik diharapkan akan menambah kesadaran bahwa pegawai pemerintah harus terus menjaga integritasnya. Karena jika tidak, akan ada *whistleblower* yang akan mengungkapkan penyimpangan integritas mereka dalam menjalankan tugas dan berakibat pada penjatuhan sanksi hukuman tanpa memandang bulu. Dengan diterapkannya *whistleblowing*

system diharapkan dapat menciptakan aparatur negara yang bersih, profesional dan bertanggung jawab (Kementerian Keuangan, 2013).

2.3 Kompetensi Aparatur

Menurut Kurniawan (2015:191-192) Kompetensi merupakan perpaduan antara keahlian, sikap dan perilaku seseorang di dalam melaksanakan pekerjaannya.

Menurut Ruky (2014:123) terdapat lima karakteristik yang membentuk kompetensi yaitu motif (*motive*), sifat (*traits*), konsep diri (*self concept*), pengetahuan (*knowledge*), dan keterampilan (*skill*).

3. Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

3.1 Pengaruh Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud

Penelitian dari berbagai institusi seperti *Organization For Economic Cooperation and Development* (OECD), *Association of Certified Fraud Examiner* (ACFE) dan *Global Economic Crime Survey* (GECS) menyimpulkan bahwa salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah dan memerangi *fraud* adalah melalui mekanisme pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*). Oleh karena itu, penyelenggaraan *whistleblowing system* yang efektif perlu digalakkan di setiap organisasi (KNKG, 2008).

Dengan menerapkan *Whistleblowing system* yang efektif mampu meminimalisir terjadinya kecurangan karena adanya komitmen organisasi tentang kebijakan perlindungan pelapor, mekanisme pelaporan yang jelas serta evaluasi dan perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas *whistleblowing system* sehingga akan mendorong partisipasi *whistleblower* untuk lebih berani bertindak dalam melaporkan kecurangan yang diketahuinya. Artinya *whistleblowing system* mampu mengurangi budaya diam menuju kearah budaya kejujuran dan keterbukaan yang berguna untuk mencegah terjadinya kecurangan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Agusyani (2016) menemukan bahwa *whistleblowing* memiliki pengaruh yang signifikan pada pencegahan kecurangan. Jadi semakin baik penerapan *whistleblowing system* di dalam organisasi, maka semakin tinggi pula tingkat pencegahan kecurangan. **H1: Whistleblowing system** berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

3.2 Pengaruh Kompetensi Aparatur Terhadap Pencegahan Fraud

Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut (Wibowo, 2016:271). Menurut Kurniawan (2015:191-192) pimpinan instansi pemerintah perlu memperhatikan tingkat kompetensi pegawai karena pegawai yang tidak memiliki kompetensi yang diperlukan akan berdampak pada kinerja yang tidak baik. Pegawai yang tidak dapat mencapai kinerja yang baik akan menimbulkan berbagai masalah. Sistem dan prosedur kerja sebaik apapun tidak akan dapat

berjalan dengan baik apabila individu yang melaksanakannya tidak memiliki kompetensi yang diperlukan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan pertimbangan mengenai tingkat kompetensi berupa pengetahuan dan keahlian yang dimiliki untuk mengerjakan pekerjaan tertentu.

Penelitian yang dilakukan oleh Agusyani (2016) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara kompetensi sumber daya manusia terhadap pencegahan *fraud*. Karena semakin bagus tingkat kompetensi sumber daya manusia maka semakin bagus pemahaman mengenai *fraud* sebagai upaya pencegahan.

H2: Kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

4. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2008:~115) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah perangkat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Bengkalis dengan jumlah 33 SOPD.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Dinas, Kasubbag Keuangan dan Bendahara Pengeluaran. Pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang bertujuan untuk menyesuaikan maksud atau tujuan tertentu dan diperlukan dalam mengambil informasi bagi peneliti.

4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan gambaran atas deskripsi mengenai variabel-variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan tabel distribusi frekuensi yang menunjukkan kisaran teoritis, kisaran aktual, nilai rata-rata (*mean*) dan standar deviasi (Ghozali, 2006:19).

4.2 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi bantuan perangkat lunak SPSS for windows versi 21. Menurut Ghozali (2013:96) analisis regresi digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan hubungan antara variabel independen dengan dependen. Persamaan regresi berganda dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Pencegahan *fraud*

A = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi untuk variabel independen *whistleblowing system*

β_2 = Koefisien regresi untuk variabel independen kompetensi aparatur

X_1 = *Whistleblowing system*

X_2 = Kompetensi aparatur

e = Variabel error

4.2 Definisi Operasional dan Variabel

Pencegahan *fraud* adalah tindakan yang dapat dilakukan untuk menghindari orang untuk berbohong, menjiplak, mencuri, memeras, memanipulasi, kolusi dan menipu orang lain dengan tujuan memperkayai diri sendiri atau orang/kelompok lain dengan cara melawan hukum (Suradi, 2006). Indikator penelitian ini menggunakan kuesioner yang diambil dari penelitian Taufik (2010) yang mengacu kepada Suradi (2006).

Menurut Kementerian Keuangan (2013) *whistleblowing system* adalah sistem berupa aplikasi pengaduan (*whistleblower*) yang dapat digunakan sebagai wadah untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan organisasi. Indikator penelitian diadopsi dari Nugroho (2015) yang mengacu kepada Komite Nasional Kebijakan Governance (2008).

Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut (Wibowo, 2016: 271). Indikator penelitian diadopsi dari Fitran (2012) yang mengacu kepada Wibowo (2016).

5. Hasil dan Pembahasan

5.1. Analisis Statistik Deskriptif

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh dari jawaban responden atas pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner. Kuesioner didistribusikan langsung ke Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Dinas, Kasubbag Keuangan dan Bendahara Pengeluaran.

5.2. Hasil Uji Validitas Data

Dari hasil uji validitas diketahui bahwa semua item pernyataan valid karena $r_{hitung} >$ lebih besar dari r_{tabel} (0,203). Artinya tiap pernyataan berkorelasi dengan skor-skor totalnya dan semuanya dinyatakan valid.

5.3. Hasil Uji Reliabilitas

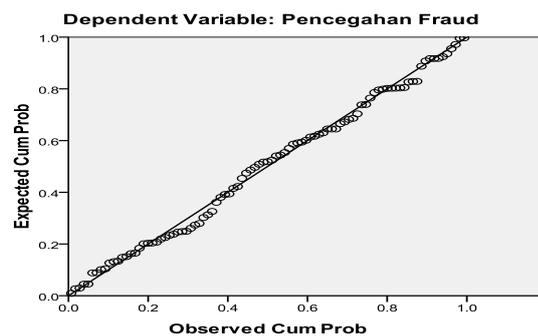
Dari hasil uji reliabilitas diketahui bahwa semua nilai koefisien reliabilitas (*Cronbach Alpha*) lebih besar dari 0,6. Artinya bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini reliabel atau dapat dipercaya.

5.4. Hasil Uji Normalitas

Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Didalam penelitian ini disajikan dalam grafik P-Plot.

Dengan melihat tampilan grafik normal P-Plot diatas dapat disimpulkan bahwa grafik normal P-Plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal serta arah penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, dapat diartikan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 1 Hasil Uji Normalitas

Sumber : Data Olahan, 2018

5.5. Hasil Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat dari besarnya *Tolerance Value* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*.

Tabel 1 Hasil uji multikolinearitas

| Model | Collinearity Statistics | |
|--------------------------------|-------------------------|-------|
| | Tolerance | VIF |
| Whistleblowing Sistem(X_1) | 0,626 | 1,596 |
| Kompetensi Aparatur(X_2) | 0,612 | 1,634 |

Sumber : Data Olahan 2018

Hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa semua nilai VIF dari variabel bebas memiliki nilai yang lebih kecil dari 10. Hasil pengujian model regresi tersebut menunjukkan tidak adanya gejala multikolinier dalam model regresi. Hal ini berarti bahwa semua variabel bebas tersebut layak digunakan sebagai prediktor.

5.6. Hasil Uji Autokorelasi

Penyimpangan autokorelasi dalam penelitian diuji dengan Durbin-Watson (DW test).

Tabel 2 Hasil Uji Autokorelasi

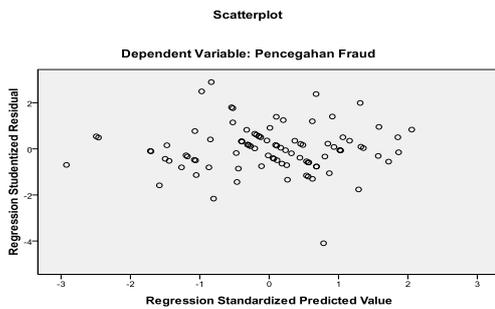
| Batas Bawah | Batas Atas | Durbin Watson | Keterangan |
|-------------|------------|---------------|--------------------|
| -2 | +2 | 1,863 | Bebas Autokorelasi |

Sumber: Data Olahan 2018

Dari hasil uji autokorelasi diketahui nilai *Durbin Watson* adalah 1,863, yang terletak antara -2 dan +2. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi.

5.7. Hasil Uji Heterokedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas.



Gambar 2 Hasil Uji Heterokedastisitas
Sumber : Data Olahan 2018

Dari gambar 2 diatas, dapat dilihat bahwa titik-titik tidak membentuk pola tertentu dan menyebar secara acak diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari gejala heterokedastisitas.

5.8. Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi menyatakan persentase total variabel dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model.

Tabel 3 Hasil Uji Koefisien Determinasi

| Model | R | R Square | Adjusted R Square |
|-------|-------------------|----------|-------------------|
| 1 | .846 ^a | .716 | .706 |

Sumber : Data Olahan 2018

Dari pengujian yang telah dilakukan, diperoleh nilai R² sebesar 0,706. Artinya adalah bahwa persentase pengaruh *whistleblowing system* dan kompetensi aparatur terhadap pencegahan *fraud* pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu sebesar 70,6%. Sedangkan sisanya sebesar 29,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini, seperti sistem pengendalian intern pemerintah, integritas aparatur.

5.9. Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Dari hasil uji regresi berganda, dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 12.219 + 0.228(X_1) + 0.251(X_2)$$

5.10. Pengaruh Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud

Dari hasil perhitungan uji t diketahui nilai t hitung sebesar 2,213 dengan signifikansi 0,029 sehingga dapat disimpulkan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu.

Adanya komitmen organisasi tentang kebijakan perlindungan pelapor, mekanisme pelaporan yang jelas dan bertanggungjawab serta dilakukannya evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan efektivitas *whistleblowing system* mampu mencegah terjadinya kecurangan.

Penelitian ini sejalan dengan Agusyani (2016) yang menemukan bahwa *whistleblowing system*

memiliki pengaruh yang signifikan pada pencegahan kecurangan dalam organisasi. Namun tidak sejalan dengan Titaheluw (2011) yang menemukan bahwa sistem *whistleblowing* bukanlah satu-satunya cara yang dapat digunakan dalam mencegah terjadinya *fraud*, terdapat pula faktor-faktor lain yang mempengaruhinya.

5.11. Pengaruh Kompetensi Aparatur Terhadap Pencegahan Fraud

Dari hasil perhitungan uji t diketahui nilai t hitung sebesar 6,871 dengan signifikansi 0,000. Dengan demikian maka kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu.

Dengan memperhatikan tingkat kompetensi yang dimiliki oleh aparatur akan mampu mencegah terjadinya *fraud*, karena aparatur tersebut telah memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan SOP yang berlaku.

Penelitian ini sejalan dengan Huslina (2015) dan Agusyani (2016) yang menunjukkan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Namun tidak sejalan dengan Hendriani (2013) yang menemukan bahwa tidak ada pengaruh kompetensi terhadap pencegahan *fraud*.

6. Kesimpulan dan Saran

6.5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. *Whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu.
2. Kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu.

6.6. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas, maka untuk peneliti menyarankan:

1. Bagi peneliti selanjutnya untuk menambah jumlah sampel yang diteliti dan memperluas lokasi penelitian sehingga diharapkan tingkat generalisasi dari analisis lebih akurat serta menambah variabel-variabel lainnya yang memiliki kemungkinan berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.
2. Bagi pemerintah Kabupaten Bengkulu diharapkan dapat lebih meningkatkan kompetensi aparatur terhadap pencegahan *fraud* baik dari dalam maupun dari luar.

Referensi

Agusyani, Ni Kadek Siska., Edy Sujana, and Made Arie Wahyuni, 2016, *Pengaruh Whistleblowing System dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pencegahan Fraud*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Vol.6 No.3

- Ghozali, Imam, 2013, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IMB SPSS 21*, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Gusnardi, 2011, *Pengaruh Peran Komite Audit, Pengendalian Internal, Audit Internal dan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Pencegahan Kecurangan*, EKUITAS Vol 15, No 1,130-146
- Huslina, Hersi, et al. 2015, *Pengaruh Integritas Aparatur, Kompetensi Aparatur dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Efektivitas Sistem Pencegahan Fraud*, Jurnal Administrasi Akuntansi. Vol.4, No.2
- Indonesia Corruption Watch (ICW), 2013. *Tren Pemberantasan Korupsi*
- , 2014. *Tren Pemberantasan Korupsi*
- , 2015. *Tren Pemberantasan Korupsi*
- , 2016. *Kinerja Penanganan Kasus Korupsi Semester I 2016*
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017
- Komite Nasional Kebijakan Governance, 2008. *Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran-SPP (Whistleblowing System-WBS)*
- Kurniawan, Ardeno, 2014, *Fraud di Sektor Publik dan Integritas Nasional*, Penerbit BPFE, Yogyakarta
- Nugroho, Vredy Octaviari. 2015, *Pengaruh Persepsi Karyawan Mengenai Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Dengan Perilaku Etis Sebagai Variabel Intervening*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
- Soleman, Rusman. 2016, *Pengaruh Pengendalian Internal dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud*, Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia Vol.17 No.1, 57-74
- Sugiyono. 2008, *Metode Penelitian Bisnis*, Penerbit Alfabeta, Bandung
- Suradi, 2006, *Korupsi Dalam Sektor Publik Dan Swasta*, Penerbit Gaya Media, Yogyakarta
- Taufik, Taufeni, 2010, *Pengaruh Internal Auditor, Eksternal Auditor dan DPRD Terhadap Pencegahan Kecurangan*, Pekbisi Jurnal Vol.2 No.2, 292-300
- Transparency International, 2013. *Corruption Perceptions Index 2013*
- , 2014. *Corruption Perceptions Index 2014*
- , 2015. *Corruption Perceptions Index 2015*
- Wibowo, 2016, *Manajemen Kinerja*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta
- Wiliyanti, 2014, *Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan, Efektivitas Pengendalian Internal, dan Peran Auditor Internal Terhadap Tingkat Kecurangan*. Jurnal Akuntansi Universitas Riau